

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS	v
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Kerangka Skripsi	17
BAB II	
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGENAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA	
A. Tinjauan Umum helm Standar Nasional Indonesia	
1. Pengertian helm Standar Nasinal Indonesia	19
2. Kriteria helm Standar Nasional Indonesia	21

3. Spesifikasi helm Standar Nasional Indonesia	23
B. Dasar Hukum Pemberlakuan Helm Standar Nasional Indonesia	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Helm Standar Pengendara Bermotor	26
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	29
C. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum	
1. Teori Validitas Hukum	29
2. Teori Efektivitas Hukum	35
D. Instansi Pemerintahan Yang Terlibat Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
1. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara	39
2. Instansi-instansi Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	49
E. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam.....	51

BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI HELM SNI BAGI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SLEMAN.

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian	57
B. Pelanggaran Dilakukan Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman	58

C.	Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Wenang Dalam Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
1.	Dinas Perhubungan Sleman	60
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman	62
3.	Polres Sleman	63
D.	Mekanisme Pengawasan dan Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor mengenai penggunaan Helm Standar oleh Polres Sleman	68
E.	Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Helm SNI Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.....	71
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94